



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : TENTARA NASIONAL INDONESIA  
**UNIT KERJA** : MABES TNI AL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DADI HARTANTO
2. Jabatan : ASISTEN OPERASI DAN LATIHAN KASAL
3. NHK : 525621

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.500.000.000

1. Tanah Seluas 4115 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI  
Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 3578 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI  
Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA  
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 1942 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI  
Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA  
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA  
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 197.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 17.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA BRIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
180.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 355.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 372.553.110

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.424.553.110



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.424.553.110

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.